

**Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Partisipasi
 Penganggaran, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)**

Ni Putu Nofy Megantari⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾

^{(1),(2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Tembau, Jalan Sangalangit, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur,,Bali
 e-mail: nofymegantari97@gmail.com

ABSTRACK

This researcher wants to find out the influence of the village financial system, participation in the establishment, and supervision of the village fund management account in the villages of the north Denpasar sub-district. The population in this study is the Village Chief, Village Secretary, and Head of Finance village in north Denpasar sub-district. The sample from this study amounted to 24 people include the village raisi, village kotibi, and the financial manager. The sample collection technique used is saturated samples. The results of this research shows that the rural financial system has a positive and significant impact on theaccountability department of rural development, participation in the budgeting has a negative and negligible impact on accountability for village fund management, and control has positive and low impact on rural fund managemet responsibility.

Keyword: *Village financial system, budgeting participation, supervision, accountability of village fund management.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah perkumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Dana desa diberikan setiap tahunnya dengan jumlah yang sudah ditentukan diperuntukkan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam penggunaan dana desa mudah menimbulkan penyalahgunaan dana oleh pihak tidak bertanggung jawab yang harusnya dapat dipercaya masyarakat untuk membangun desa yang semaikin maju dan brkembang.

Salah satu kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Desa Pemecutan Kaja senilai 190 juta (dikutip dari balipost.com 13 januari 2020) dengan menyelewangkan uang pungutan yang berasal dari pungutan uang warung, toko dan pasar desa yang harusnya dimaksukkan kekas desa tetapi dibagikan langsung kepada perangkat desa maupun penyertaan modal desa BUMDes.

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pejabat yang berwenang memerlukan laporan berupa laporan, karena setiap kantor keuangan desa wajib melapor kepada penduduk desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Riyanto, 2015).

(Leitch & Davis, 1983) menyatakan bahwa penggunaan system keuangan dalam suatu organisasi diperlukan karena penanganan transaksi sehari-hari merupakan strategi harian dalam organisasi dan mampu menyajikan laporan yang berkualitas kepada mereka yang membutuhkan.

Pengawasan ialah usaha sistematis untuk menentukan standar kinerja ketika merencanakan system penilaian informasi, membandingkan kinerja actual dibandingkan dengan standar yang ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan penggunaan sumber data atau pemerintah organisasi secara efektif untuk mencapai rancangan organisasi (Anggraeni, 2014: 7).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

Dalam konteks ini, isu-isu yang dibahas adalah:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Peengawasan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Keuntungan teoritis dari pembahasan ini adalah kontribusi ilmiahnya terhadap ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang mengambil topik serupa. Manfaat praktis studi ini bisa menjadi tambahan pembelajaran dan wawasan mengenai Sistem Keuangan Desa, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Raharjo (2007) Teori Stewardship berpendapat bahwa ada hubungan erat antara kesuksesan perusahaan dan kepuasan pemilik. Pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Perangkat desa bertindak sebagai steward harus melakukan yang terbaik untuk melayani kepentingan klien mereka atau prinsipal, yaitu masyarakat dan otoritasnya, dengan menggalang dan melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, gagasan pengelolaan dana desa baru dapat tercapai dengan optimal.

Akuntabilitas adalah pemegang amanah/agen berkewajiban menjelaskan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, kepala desa sebagai pemegang amanah/agen bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian sampai pengawasan (Mardiasmo, 2010).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Kementerian Dalam Negeri mengembangkan program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menaikkan kualitas pengelolaan keuangan desa sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam SISKEUDES sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa yang dibuat sederhana dan mudah untuk dioperasikan (BPKP, 2018).

Menurut Brownell (1982) partisipasi dalam penyusunan anggaran ialah seberapa besar individu terlibat dalam proses penyusunan anggaran, yang kemudian kinerjanya dievaluasi dalam memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran yang telah ditentukan. Pengawasan ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan jika sesuai dengan susunan, konsep dan keinginan yang telah disetujui (Baswir, 1997).

Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Pengembangan program Siskeudes yang tujuannya merealisasikan kebutuhan mengelola keuangan desa dan pelaporan yaitu menjelaskan darimana dan untuk apa uang atau dana desa digunakan. Aparat desa dapat dipermudah dalam menyusun berbagai dokumen keuangan dengan penerapan Aplikasi Siskeudes dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H1: Sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kenis (1979) mengutarakan keterlibatan dalam penganggaran ialah sejauh mana manajer berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan pengaruhnya terhadap tanggungjawab utama

manajer yang terlibat demi mendapat tujuan yang diinginkan. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran dapat membuat perencanaan anggaran lebih transparan dan terhindar dari kecurangan.

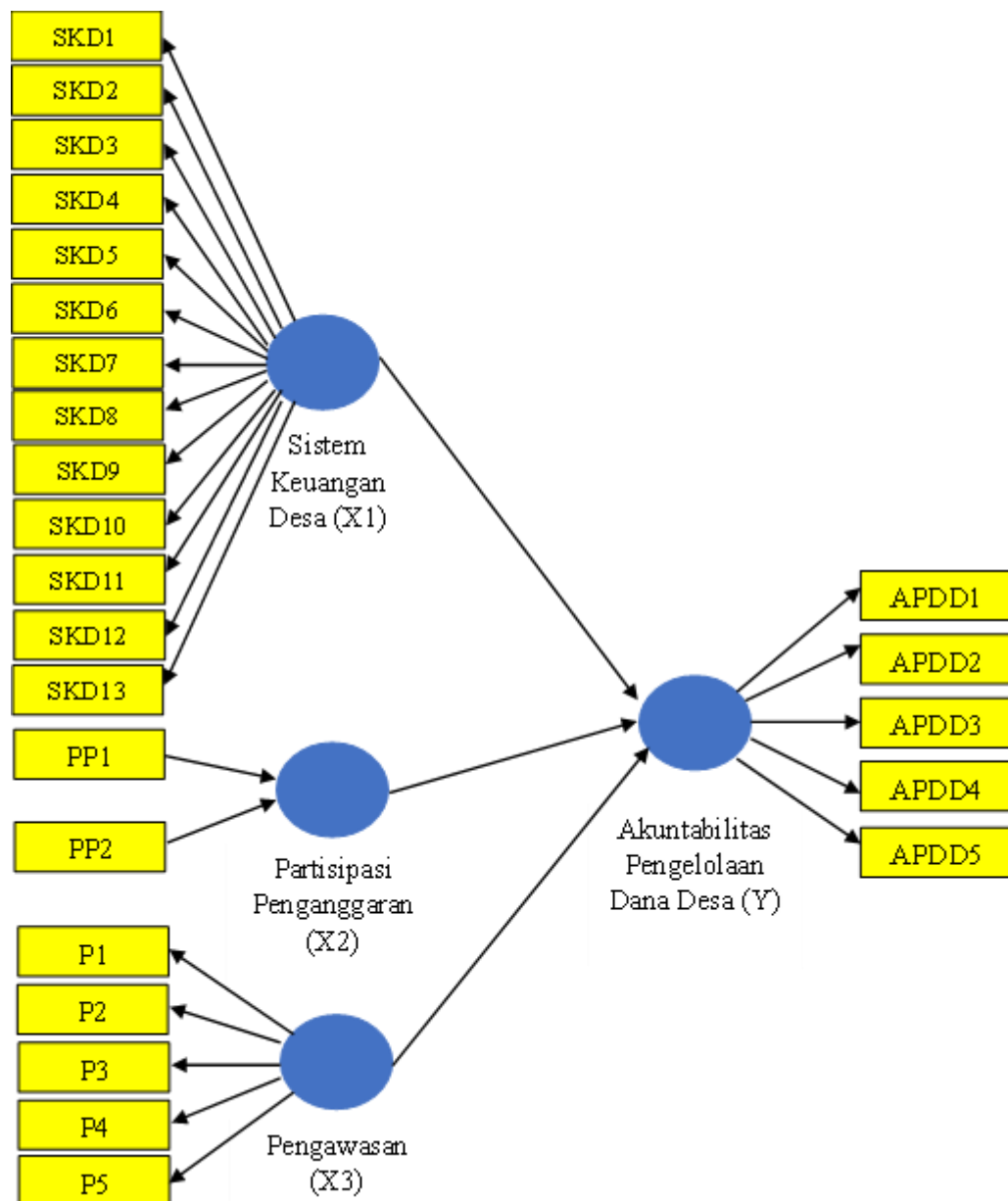
H2: Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Demi mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan diperlukannya pengawasan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Pengawasan sangat penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan pelanggaran atas tujuan yang akan dicapai.

H3: Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data Diolah (2022)

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui instrument survei. Populasi merupakan kawasan yang terdiri dari subjek-subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk diselidiki kemudian menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016:117). Dalam kajian ini populasi yang digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara yang berjumlah 24 orang.

Sampel adalah Sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi (Sugiyono, 2011:91). Penelitian ini melibatkan 24 responden, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Kepala Urusan Keuangan. Sebagai metode penentuan sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan sampel jenuh yang mencakup total populasi, mirip dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis PLS atau *Partial Least Square*, Menurut Ghazali (2021), analisis PLS-SEM terbagi menjadi *outer model* dan *inner model*. *Outer model* juga disebut model pengukuran memperlihatkan bagaimana variabel manifest mewakili pengukuran variabel laten, sedangkan *inner model* atau model struktural menggambarkan kekuatan estimasi antar variabel laten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif dan Karakteristik Responden

Metode dalam penelitian ini ialah metode survey kepada 24 responden. Penilaian terhadap masing-masing variabel beserta indikatornya. Hasil perhitungan dari analisis deskriptif, variabel sistem keuangan desa nilai indikatornya rata-rata berbobot 4,39. Variabel partisipasi penganggaran nilai indikatornya rata-rata berbobot 4,40. Variabel pengawasan nilai indikatornya rata-rata berbobot 4,38, dan Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai indikatornya rata-rata berbobot 4,06.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Variable laten dalam penelitian ini dibentuk dari indikator-indikator yang bersifat reflektif, maka pengukuran validasi dan reliabilitas indikator-indikator ini adalah: a) *convergent validity*, b) *discriminant validity*, dan c) *composite reliability and cronbach's alpha*.

a) Convergent validity

Tabel 1. Nilai *Outer Loading* sebelum eksekusi

Variable	Indicator	Nilai Korelasi
Sistem Keuangan Desa	SKD1.1	-0,157
	SKD1.2	-0,002
	SKD1.3	-0,107
	SKD1.4	0,085
	SKD1.5	0,276
	SKD1.6	0,697
	SKD1.7	0,763
	SKD1.8	0,555
	SKD1.9	0,796
	SKD1.10	0,748
	SKD1.11	0,855
	SKD1.12	0,845
	SKD1.13	0,727
Partisipasi Penganggaran	PP2.1	0,600
	PP2.2	0,929
	PP2.3.	0,881
	PP2.4	0,878
	PP2.5	0,162
	PP2.6	0,385
Pengawasan	P3.1	0,794
	P3.2	0,835
	P3.3	0,222
	P3.4	0,556
	P3.5	0,772
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	APDD.1	0,794
	APDD.2	0,555
	APDD.3	0,611
	APDD.4	0,521
	APDD.5	0,340
	APDD.6	0,606

APDD.7	0,122
APDD.8	0,419
APDD.9	0,620
APDD.10	-0,039

Sumber : Data Diolah (2022)

Tabel 1 menunjukkan ada beberapa indikator yang tidak mencukupi kriteria *discriminant validity* yang nilainya lebih kecil dari 0,60 sehingga harus dieliminasi. Berikut nilai outer loading yang indikatornya sudah dieliminasi:

Tabel 2. Nilai *Outer Loading* setelah eksekusi

Indikator<-Konstruk	Original Sampel (O)	T-Statistik (O/STDEV)	P Values
SKD1.7 <- Sistem Keuanga Desa	0,783	3,964	0,000
SKD1.9 <- Sistem Keuanga Desa	0,768	3,491	0,001
SKD1.11 <- Sistem Keuanga Desa	0,865	5,872	0,000
SKD1.12 <- Sistem Keungan Desa	0,901	12,132	0,000
SKD1.13 <- Sistem Keuangan Desa	0,755	6,567	0,000
PP2.2 <- Partisipasi Penganggaran	0,930	7,780	0,000
PP2.3 <- Partisipasi Penganggaran	0,906	5,734	0,000
PP2.4 <- Partisipasi Penganggaran	0,887	5,065	0,000
P3.1 <- Pengawasan	0,852	3,202	0,001
P3.2 <- Pengawasan	0,831	3,434	0,001
P3.5 <- Pengawasan	0,826	5,082	0,000
APDD1 <- Akuntabilitas	0,946	13,559	0,000
APDD2 <- Akuntabilitas	0,903	6,444	0,000

Sumber : Data Diolah (2022)

Semua indikator pada table 2 dari perhitungan *outer loading* sudah bernilai diatas 0,60 dan signifikan yang merupakan syarat dari kriteria *discriminant validity*.

b) *Discriminant Validity*

Tabel 3. Uji *Discriminant Validity*

Variabel	AVE	\sqrt{AVE}	Sistem Keuangan Desa	Partisipasi Penganggaran	Pengawasan
Sistem Keuangan Desa	0,667	0,817			
Partisipasi Penganggaran	0,825	0,908	0,732		
Pengawasan	0,699	0,836	0,636	0,640	
Akuntabilitas	0,855	0,925	0,595	0,369	0,472

Sumber: Data Diolah (2022)

Poin AVE pada tabel 3 lebih besar 0,50 dan poin \sqrt{AVE} bernilai 0,817-0,925 melebihi nilai korelasi yang bernilai 0,369-0,732, sehingga syarat valid *discriminant validity* sudah terpenuhi.

c) *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Tabel 4. Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variable	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sistem Keuangan Desa	0,878	0,909
Partisipasi Penganggaran	0,894	0,934
Pengawasan	0,792	0,874
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,834	0,922

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 4 membuktikan masing-masing konstruk sudah memenuhi syarat berdasarkan kriteria *composite reliability* yang nilainya lebih tinggi dari 0,60.

Inner Model/Struktural Model (Evaluasi Model Struktural)

Inner Model/Structural Model (Evaluasi Model Struktural) merupakan model pengukuran yang dimaksudkan untuk menila semua level ketepatan model dalam studi ini. Untuk mengevaluasi model stuktural ini dilakukan bebrapa pendekatan: a) *R-square (R²)*, b) *F-square*, c) *Path Analysis*.

a) *R-square*

Tabel 5. Evaluasi Model Struktural *Inner*

	R-Square	R-Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,391	0,299

Sumber : Data Diolah 2022

Nilai R^2 pada tabel 5 akuntabilitas pengelolaan dana desa 0,391 berdasarkan kualifikasi Chin (Ghozali, 2021), model tersebut termasuk kriteria moderat, artinya adalah variasi sistem keuangan desa, partisipasi penganggaran, dan pengawasan sebesar 39,1%.

b) *F-square*

Tabel 6. Evaluasi Model *F-Square*

Variabel	Akuntabilitas
Sistem keuangan desa	0,262
Partisipasi penganggaran	0,035
Pengawasan	0,044

Sumber: Data Diolah (2022)

Dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukkan nilai *F-square* variabel system keuangan desa yang memiliki nilai 0,262 yang memiliki pengaruh besar dan sisanya bernilai <0,15 sehingga memiliki pengaruh yang kecil.

c) *Path Analysis*

Tabel 7. *Path Analysis* dan Pengujian Statistik

Variable	Original Sampel (O)	T-Statistik (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Sistem Keuangan Desa -> Akuntabilitas	0,619	2,048	0,041	Signifikan
Partisipasi Penganggaran -> Akuntabilitas	-0,227	0,801	0,424	Tidak Signifikan
Pengawasan -> Akuntabilitas	0,224	0,784	0,434	Tidak Signifikan

Sumber : Data Diolah (2022)

Tabel 7 menunjukkan bahwa:

1. Sistem keuangan desa bernilai sebesar 0,619, dengan nilai T-statistik 2,048 dan T-tabel bernilai 1,96, yang artinya berdampak positif dan berarti pada taraf 0,05.
2. Partisipasi penganggaran bernilai 0,227, dengan nilai T-statistik 0,05 dan T-tabel bernilai 1,96, yang artinya berdampak negative dan tidak signifikan pada taraf 0,05
3. Pengawasan bernilai 0,224, dengan nilai T-statistik 0,784 dan T-tabel 1,96, yang artinya berdampak positif dan tidak signifikan pada taraf 0,05.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil diatas memperlihatkan bahwa:

1. Sistem keuangan desa berdampak positive dan berarti terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan semakin baik pengaplikasian sistem keuangan desa semaikin akuntabel pula pengendalian dana desanya.
2. Partisipasi penganggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan partisipasi penganggaran tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengawasan berdampak positif dan tidak berarti terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan yang rendah maka akuntabilitas pengelolaan dana desanya juga semakin rendah.

Beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan memperluas fokus penelitian dan penambahan variabel terkait yang menghambat tercapainya akuntabilitas

pengelolaan dana Desa. Serta memperluas populasi agar hasil penelitian mampu memiliki tingkat generalisasi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Financial and Management*, 11(4), pp. 306-337. Diakses pada 30 oktober 2021, dari University of South Florida.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L.M(2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran), (ISSN 2662-9404). Diakses 25 Maret 2021, dari Prosiding 2nd Bussiness and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 3(1), pp: 67-82. Diakses 15 April 2021, dari JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting).
- Balipost.com. (2020, januari 13). Tak Setorkan Pungutan Ke Rekening Desa, Ini Modus Kades Pemecutan Kaja. Diakses 23 September 2020, dari <https://www.balipost.com/news/2020/01/13/98447/Tak-Setorkan-Pungutan-ke-Rekening...html>
- Baswir, R. (1989). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE Yogyakarta.
- Brownell, P. (1980). Participation in the budgetng process: When it works and when it doesn't. Cambridge, Mass: Alfred P. Sloan School of Managemet, Massachusetts Institute of Technology. Tersedia dalam participationinb1172brow.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. ISSN 979-704-015-1. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Square* : Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Harafonna, C. N., & Indriani, M. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. 4(2), 359-373. Diakses 16 April 2021, dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).
- Harjito, Y. Achyani, F., & Payamta, P. (2015).. Implementasi *E-Procurement* Ditinjau Dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model Delone dan Mclean. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1). Diakses 16 April 2021, dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB) .
- Laya, K. A. Syaukat, Y. & Sarman, M. (2021). Pengaruh Regulasi, Pengawasan, KepalaDesa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. 9(4). Diakses 16 April 2021, dari Jurnal Manajemen Agribisnis.
- Leitch, R. A., & Davis, K. R. (1992). *Accounting Information Systems: Theory and Practice*. Prentice Hall.
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. LN.2014/No.168, TLN No.5558, LL SETNEG : 17 HLM.

- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. LN.2014/No.7, TLN No.5495, LL SETNEG: 65 HLM.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1).
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara, 3(1), 199-130. Diakses 16 April 2021, dari ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Sugiarti, E. & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang), ISSN-2252-3936. Diakses 25 Maret 2021, dari (SNAB) Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(3), 471-481.